



LAPORAN KINERJA 2026

Triwulan II

**BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPSDI sebagai unit kerja eselon III.b di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Selama Triwulan II tahun 2026, BRPSDI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2026. Laporan ini memuat informasi mengenai target dan capaian kinerja, serta keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai pelaksanaan program kerja BRPSDI selama Triwulan II tahun 2026. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi internal sekaligus umpan balik yang berguna dalam perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKj ini. Harapan kami, laporan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan semua kegiatan BRPSDI selama Triwulan II Tahun 2026.

Purwakarta, 17 Juli 2026

Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber
Daya Ikan



Ir. Iswari Ratna Astuti

NIP. 19691124 199503 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Struktur Organisasi.....	2
1.5. Keragaan Pegawai	3
1.6. Sistematika Laporan Kinerja.....	5
1.7. Potensi dan Permasalahan	6
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis.....	9
2.2. Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI	13
2.3. Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2026	13
2.4. Pengukuran Kinerja	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2026.....	16
3.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja	17
3.3. Akuntabilitas Keuangan	31
3.4. Efisiensi Sumber Daya	47
IV. PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut.....	49
4.3. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi TW II Tahun 2026.....	49
4.4. Saran.....	50
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tangkapan layar capaian indikator Kinerja BRPSDI Triwulan II tahun 2026 pada aplikasi KINERJAKU.....	v
Gambar 2. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020	3
Gambar 3. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan ASN dan non ASN Triwulan II Tahun 2026	4
Gambar 4. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional Triwulan II Tahun 2026	5
Gambar 6. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada Dashboard Aplikasi Tahun 2026 per tanggal 13 Juli 2026 Sumber: (http://kinerjaku.kkp.go.id).	16
Gambar 7. Indikator Capaian Kinerja pada Aplikasi KInerjaku.....	48

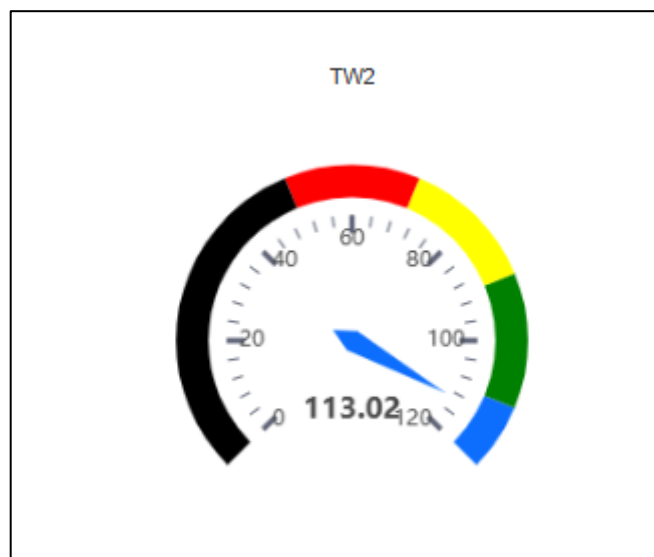
DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) BRPSDI selama Triwulan II Tahun 2026.....vi
Tabel 2.	Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2026 4
Tabel 3.	Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2026 6
Tabel 4.	Rancangan indikator dan target kinerja BRPSDI tahun 2025 - 2029 12
Tabel 5.	Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2026 13
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2026 13
Tabel 7.	Hasil Pengukuran Capaian kinerja BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 16
Tabel 8.	Capaian IKSK.01.01 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026..... 18
Tabel 9.	Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%) lingkup BPPSDMKP TW II Tahun 2026 19
Tabel 10.	Capaian IKSK.01.02 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 20
Tabel 11.	Capaian IKSK.01.03 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 21
Tabel 12.	Capaian IKSK.01.04. BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 22
Tabel 13.	Capaian IKSK.01.05 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 23
Tabel 14.	Capaian IKSK.01.06 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 24
Tabel 15.	Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) BPPSDMKP Triwulan II tahun 2026..... 25
Tabel 16.	Capaian IKSK.01.07 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 26
Tabel 17.	Capaian IKSK.01.08. BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 27
Tabel 18.	Hasil Perhitungan Capaian IKSK.01.08 Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI Triwulan II Tahun 2026..... 27
Tabel 19.	Capaian Dukungan Manajemen lingkup BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2026..... 28
Tabel 20.	Capaian IKSK.01.09 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 29
Tabel 21.	Capaian IKSK.01.10 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 29
Tabel 22.	Capaian IKSK.01.11 Triwulan II Tahun 2026..... 30
Tabel 23.	Capaian Nilai PNBK lingkup BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2026..... 30
Tabel 24.	Tabel Kronologi Revisi Anggaran BRPSDI Triwulan II Tahun 2026..... 31
Tabel 25.	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II tahun 2026 32
Tabel 26.	Realisasi Anggaran BRPSDI per IKSK Triwulan II Tahun 2026..... 47
Tabel 27.	Permasalahan, Rekomendasi dan Tindaklanjut Triwulan II Tahun 2026 49
Tabel 28.	Permasalahan, Rekomendasi dan Tindaklanjut Triwulan IIV Tahun 2025..... 49

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI Jatiluhur Triwulan II Tahun 2026 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BRPSDI Jatiluhur Triwulan II Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada awal tahun 2026, BRPSDI Jatiluhur telah merancang dokumen "Perjanjian Kinerja BRPSDI Jatiluhur Tahun 2026" yang terdiri dari satu Sasaran Kegiatan (SK) dan sebelas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

Capaian kinerja BRPSDI Jatiluhur Triwulan II Tahun 2026 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat diakses melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 1. Tangkapan layar capaian indikator Kinerja BRPSDI Triwulan II tahun 2026 pada aplikasi KINERJAKU

Hasil pengukuran Indikator Kinerja BRPSDI pada Tahun 2026 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **113,02 %**, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKSK.

Secara umum, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan termasuk dalam kategori Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Dari sebelas IKSK yang telah disetujui, sebanyak 6 (empat) IKSK yang diukur selama periode Triwulan II

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%), memiliki target Triwulan II yakni 86,00, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 86 (100,00%)
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Niai), memiliki target Triwulan II yakni 83,00, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 99,96 (120,00%)
3. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks), memiliki target Triwulan II yakni 75,00, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 85,28 (113,71%)
4. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%), memiliki

- target Triwulan II yakni 77 , dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%)
5. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target Triwulan II yakni 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (100,00%);
 6. Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target Triwulan II yakni Rp. 4.500.000 dan sudah tercapai dengan nilai capaian Rp. 7. 598.544 (120,00%).

Gambaran lengkap capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) BRPSDI selama Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) BRPSDI selama Triwulan II Tahun 2026

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TWII 2026		%
		TARGET	REALISASI	
01 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	86	86	100,00
	02 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	83	99,96	120,00
	03 Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)			
	04 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)			
	05 Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	75	85,28	113,71
	06 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	77	100	120,00
	07 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)			
	08 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00
	09 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)			
	10 Keterbukaan Informasi Publik			

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TWII 2026		%
		TARGET	REALISASI	
	BRPSDI (Nilai)			
	11 Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	4.500.000,00	7.598.544,00	120,00

Secara Umum, Nilai Kinerja Organisasi BRPSDI pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dikategorikan **Istimewa** dengan skor **113,02 %**, Capaian kinerja BRPSDI dari 6 Indikator kinerja yang diukur, sebanyak 2 indikator kinerja berhasil mencapai prosentase capaian melebihi 120%, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya berhasil memperoleh nilai capaian lebih dari 100%. Penjabaran detail mengenai capaian IKU akan dijelaskan secara rinci dalam sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja. Pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, BRPSDI berhasil mencapai realisasi anggaran berdasarkan aplikasi Sakti sebesar 54,29% dari pagu anggaran efektif. Pagu tersebut merupakan pagu awal sebesar Rp. 5.411.805.000,- dimana pagu efektif yang digunakan menjadi senilai Rp 5.023.508.000,-

Selama pelaksanaan kegiatan Triwulan II tahun 2026, beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain adanya dinamika kebijakan penganggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPPSDM KP sehingga berdampak pada perubahan perencanaan dan rencana aksi yang dilakukan BRPSDI. Sebagai upaya perbaikan, Kondisi ini ditindaklanjuti BRPSDI dengan optimalisasi dan rekomposisi anggaran dalam mendukung target kinerja sehingga secara umum capaian kinerja melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja BRPSDI pada tahun 2026 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam memberikan arahan guna meningkatkan kinerja BRPSDI pada masa mendatang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Eselon III.b di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BRPSDI berada pada lingkup unit organisasi binaan dibawah Sekretariat BPPSDMKP sebagai Unit Organisasi Pembina. BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020 yakni melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Laporan Kinerja BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerjanya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan berdasarkan pada:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- 8) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029;
- 9) Perjanjian Kinerja BRPSDI Tahun 2026.

Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI dalam rangka mewujudkan good governance, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di BRPSDI. Oleh karena itu, BRPSDI sebagai

Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2026 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja (LKj) selama Triwulan II Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. LKj BRPSDI disampaikan kepada Kepala BPPSDMKP melalui Sekretaris BPPSDMKP.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6 “Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai saat ini KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.

BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dalam surat Nomor: B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020. BRPSDI mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 3 PER.80/MEN/2020 terkait tugasnya Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 2) Pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, mencangkup restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerja sama riset;
- 4) Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Penyelenggaraan fungsi BRPSDI tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan Tim Kerja selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 meliputi Koordinasi dan pelaksanaan Fungsi Dukungan Manajerial, Keuangan, BMN, Kepegawaian, Perencanaan, Monev, Pelaporan, Pelayanan, Persuratan dan Rumah Tangga.

Dukungan hasil penelitian bagi pengelolaan sumber daya ikan sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai dapat optimal dan berlandaskan kajian ilmiah. Keberadaan BRPSDI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

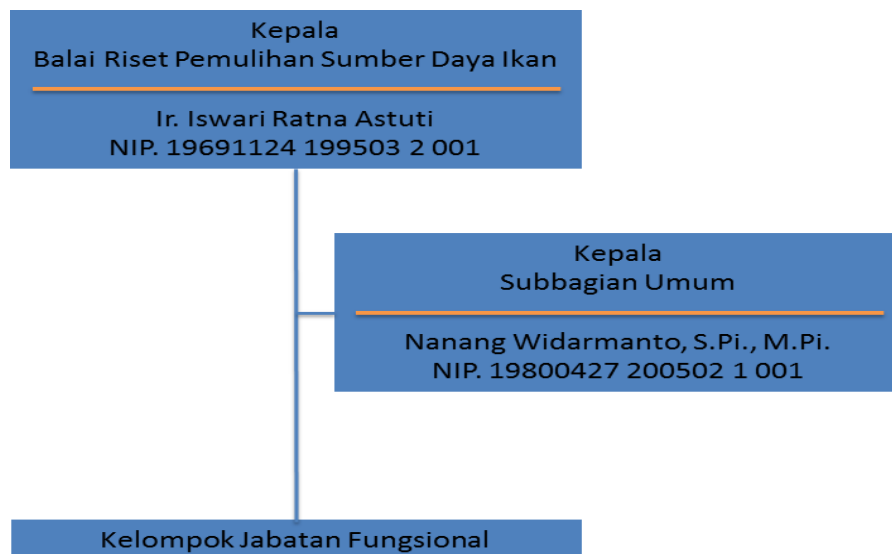
- 1) Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya perikanan,
- 2) Pemulihan sumber daya ikan,
- 3) Monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
- 4) Perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

1.4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja BRPSDI tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BRPSDI terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri atas jabatan fungsional instruktur, perencanaan, analisis pranata keuangan, dan pustakawan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020

Berdasarkan Surat Tugas Kepala BRPSDI Nomor B.633/BRPSDI/KP.440/XII/2025, Kepala BRPSDI dibantu oleh 1 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan jumlah anggota sebanyak 29 orang ASN untuk mewujudkan 11 Indikator Kinerja Kegiatan dengan uraian fungsi sebagai berikut :

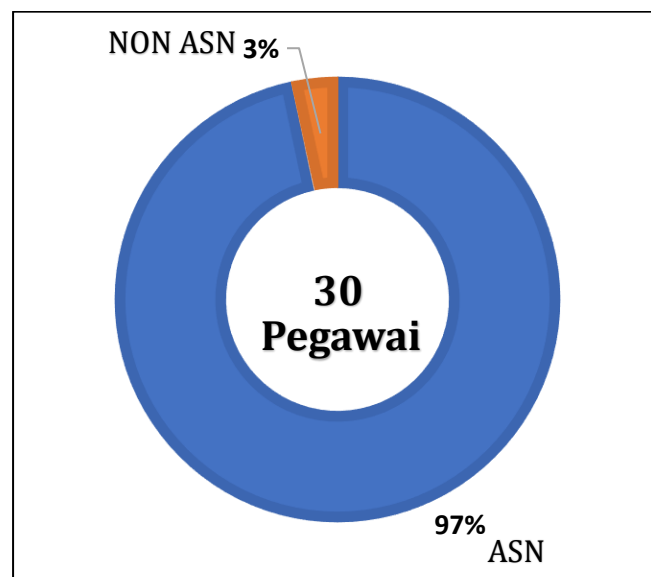
- a. Rincian pelaksanaan kegiatan manajerial tersusun rapih
- b. Peran anggota Tim Kerja terbagi sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan
- c. Kegiatan sesuai dengan perencanaan
- d. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja
- e. Tersusunnya hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
- f. Terlaksananya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara anggota Tim Kerja

1.5. Keragaan Pegawai

Kondisi sumber daya manusia di BRPSDI Tahun 2026 adalah pegawai BRPSDI berjumlah 30 orang terdiri dari 29 Pegawai ASN (PNS dan PPPK) dan 1 pegawai non-ASN (PJLP) dengan rasio 97,00% dan 3% (**Gambar 3**). Jumlah SDM yang terdapat di BRPSDI masih relatif ideal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Kondisi sumber daya manusia BRPSDI Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2026

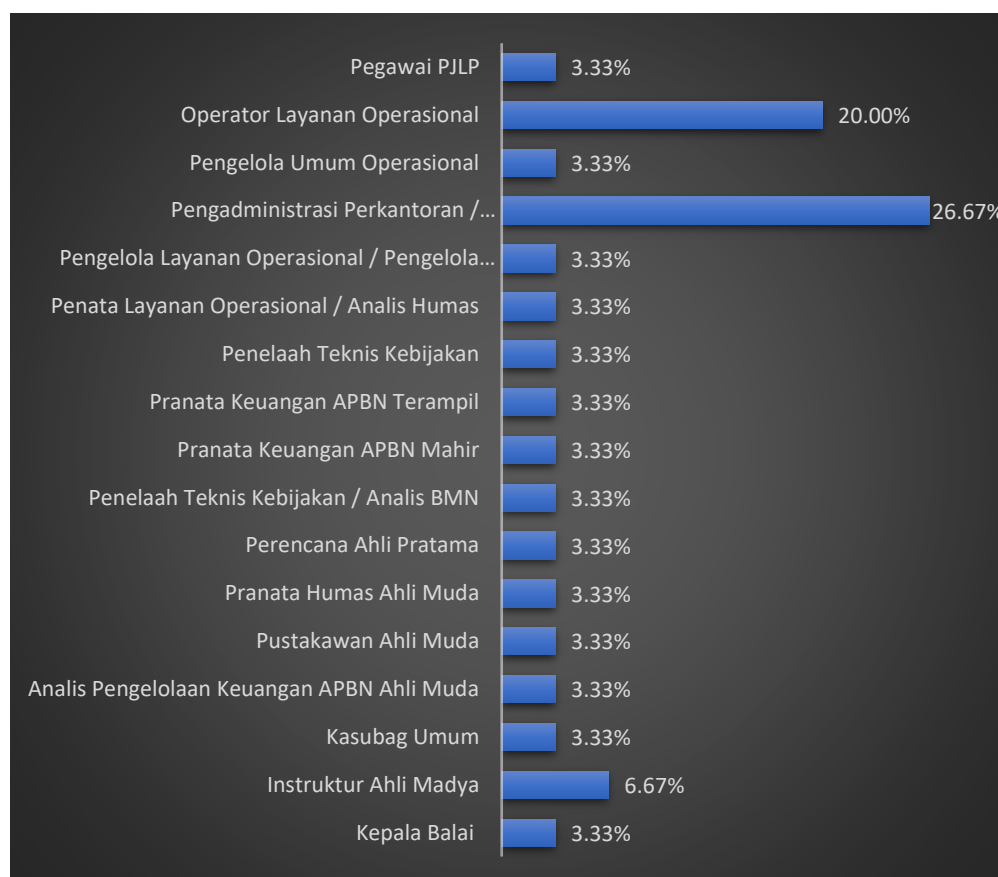
Nama Jabatan	ASN	NON ASN
Kepala Balai	1	
Instruktur Ahli Madya	2	
Kasubag Umum	1	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	
Pustakawan Ahli Muda	1	
Pranata Humas Ahli Muda	1	
Perencana Ahli Pratama	1	
Penelaah Teknis Kebijakan / Analisis BMN	1	
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	
Penelaah Teknis Kebijakan	1	
Penata Layanan Operasional / Analisis Humas	1	
Pengelola Layanan Operasional / Pengelola Keuangan	1	
Pengadministrasian Perkantoran / Pengadministrasian Umum	8	
Pengelola Umum Operasional	1	
Operator Layanan Operasional	6	
Pegawai PJLP		1
TOTAL	29	1
JUMLAH	30	



Gambar 3. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan ASN dan non ASN Triwulan II Tahun 2026

Peta sebaran ASN di BRPSDI terdiri dari 1 orang Kepala Balai, 1 orang Kasubag Umum, 2 orang Instruktur Ahli Madya, 1 orang Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, 1 orang Pustakawan Ahli

Muda, 1 Pranata Humas Ahli Muda, 1 Perencana Ahli Pratama, 5 Penelaah Teknis Kebijakan, 1 Pranata Keuangan APBN Mahir, 1 Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 Penata Layanan Operasional / Analisis Humas, 1 Pengelola Layanan Operasional / Pengelola, 8 Pengadministrasi Perkantoran, 6 Operator Layanan Operasional, dan 1 Pengelola Umum Operasional (**Gambar 3**).



Gambar 4. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional Triwulan II Tahun 2026

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2026.
2. Bab I Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. .
6. Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.7. Potensi dan Permasalahan

1.7.2. Potensi

A. Organisasi

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dengan program riset pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) diharapkan mampu mengatasi masalah dan menjawab kendala mengenai degradasi sumber daya ikan yang ada secara efektif dan efisien, sehingga mampu memprediksi, mencegah, dan mengatasi berbagai permasalahan kerusakan sumber daya ikan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRPSDI didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik.

B. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi yang merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yang dilaksanakan melalui kegiatan riset perikanan.

SDM Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) (pegawai negeri sipil/PNS dan PPPK) dan non ASN /tenaga kontrak. Pada tahun 2026 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan memiliki SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 29 orang yang dibantu oleh pegawai dengan perjanjian kerja kontrak / Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 1 orang (**Tabel 3**).

Tabel 3. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2026

Nama Jabatan	ASN	NON ASN
Kepala Balai	1	
Instruktur Ahli Madya	2	
Kasubag Umum	1	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	
Pustakawan Ahli Muda	1	
Pranata Humas Ahli Muda	1	
Perencana Ahli Pratama	1	
Penelaah Teknis Kebijakan / Analisis BMN	1	
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	
Penelaah Teknis Kebijakan	1	

Nama Jabatan	ASN	NON ASN
Penata Layanan Operasional / Analis Humas	1	
Pengelola Layanan Operasional / Pengelola Keuangan	1	
Pengadministrasi Perkantoran / Pengadministrasi Umum	8	
Pengelola Umum Operasional	1	
Operator Layanan Operasional	6	
Pegawai PJLP		1
TOTAL	29	1
JUMLAH	30	

b. Sumber Daya Sarana-Prasarana

Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan meliputi aset berwujud. Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi riset maupun pengembangan SDM diantaranya sarana laboratorium yang tersebar di unit kerja untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang obyek riset dan pengembangan KP. Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2026, diantaranya

- Laboratorium Pengujian BRPSDI yang terdiri atas Laboratorium Kimia Air, Laboratorium Biologi Ikan, Laboratorium Plankton dan Larva, Laboratorium Bentos dan Laboratorium Genetik.
- Gedung Kantor seluas: 1.058 m² dengan No. IMB: 503/IMB.410-DTRB/2004, tgl. 17 September 2004 yang terdapat di sekitar kawasan Waduk Ir. H. Djuanda;
- Luas Tanah 3.988 m² yang berlokasi di kawasan Munjul, Purwakarta yang dipergunakan untuk rumah dinas;
- Beberapa sarana dan prasarana lainnya seperti guest house, perpustakaan, peralatan laboratorium dan survei lapangan serta kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

1.7.2. Permasalahan

Permasalahan utama dalam bidang pemulihan sumber daya ikan adalah kompleksnya penyebab penurunan sumber daya ikan akibat tangkap lebih dan kerusakan atau penurunan kualitas habitat perairan akibat pencemaran atau dampak aktivitas antropogenik lainnya disamping penyebab alami seperti suksesi ekologi, perubahan iklim dan bencana alam. Pemulihan sumber daya ikan membutuhkan latar belakang data dan informasi serta model restocking dan rehabilitasi/restorasi yang relevan sehingga upaya pemulihan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien serta optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan menjadi penting dalam rangka mendukung salah satu misi KKP yaitu “Keberlanjutan” karena sumber daya ikan yang pulih artinya dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan mengingat sifatnya yang dapat diperbarui.

Upaya pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset di BRPSDI yang teridentifikasi antara lain:

- Perubahan kelembagaan paska transformasi lembaga riset berdampak penurunan pemanfaatan sarana dan prasarana riset dan perubahan target kinerja pada tahun 2026.
- Pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber PNB BP BRPSDI.
- Terbatasnya informasi dan anggaran dalam pelibatan dan keikutsertaan pegawai pada pelatihan

- dan seminar menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja.
4. Adanya efisensi anggaran sehingga menyebabkan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh kepada kinerja di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber utama pangan, penyedia lapangan kerja dan pemberi manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga perikanan mempunyai arti penting sosial dan ekonomi yang sangat besar. Sampai saat ini, sebagian besar kebutuhan produk perikanan Indonesia masih dipenuhi dari kegiatan perikanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan perikanan yang dinamis dan meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan telah meningkatkan eksploitasi sumber daya secara intensif. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari stok ikan dieksploitasi secara penuh, bahkan diusahakan secara berlebihan. Selain itu, masalah degradasi lingkungan semakin meningkatkan laju penurunan sumber daya hayati perikanan di kawasan perairan umum daratan dan pesisir laut. Dampak dari kondisi tersebut sumber daya ikan mengalami penurunan baik stok ikan maupun kualitas habitatnya sehingga memerlukan pemulihan.

Penyediaan data dan informasi serta teknologi mengenai pemulihan sumber daya ikan akan terpenuhi dan lebih terkoordinir jika ditangani oleh suatu lembaga riset yang mempunyai mandat untuk melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan institusi riset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dan mempunyai mandat melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut di tingkat nasional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga semua peneliti yang sebelumnya bekerja di BPPSDM akan diintegrasikan ke dalam BRIN. Hal ini mengakibatkan transformasi kelembagaan, tugas, dan fungsi BPPSDM. Seluruh peneliti di BPPSDM harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan memindahkan diri ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berdampak pada transformasi kelembagaan Pusat dan UPT yang terkait dengan BPPSDM. Penyesuaian ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Meskipun demikian, KKP masih dalam proses menyusun Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tersebut. Sehingga, susunan organisasi dan tata kerja BPPSDM untuk level Unit Pelaksana Teknis masih mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.

Sebagai unit kerja di bawah BPPSDM KP, rencana strategis BRPSDI mengacu pada rencana strategis BPPSDM KP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2029. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) berperan sentral dalam penyiapan SDM yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan Blue Economy KKP. Strategi pengembangan SDM dijalankan melalui program penyuluhan, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2025–2029. Beberapa program utama yang dikedepankan meliputi:

1. Penyuluhan KP dengan pendekatan *Super Extension (Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable)*;
2. Pendidikan KP melalui pengembangan Ocean Institute of Indonesia (OII);
3. Pelatihan KP berbasis Corporate University dan Community Learning Center;
4. Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP melalui Certification Agency (Certifa).

Renstra BPPSDM KP 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis jangka menengah yang bersifat indikatif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penyusunan dimulai dengan evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, dilanjutkan dengan analisis potensi dan permasalahan, serta telaah lingkungan strategis nasional maupun global. Hasilnya diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta mengoptimalkan peran SDM kelautan dan perikanan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

2.1.1. Visi

Visi KKP 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi BRPSDI adalah mendukung Visi BPPSDMKP sesuai renstra BPPSDMKP tahun 2025-2029 yang juga mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2. Misi

Misi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan serta mengacu pada BPPSDMKP yang melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentrasentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

2.1.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dukungan pada pencapaian tujuan BPPSDMKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing; dan

2. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan BPPSDM guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, secara umum fungsi BRPSDI meliputi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- 2) Pelaksanaan penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 4) Pengelolaan sarana dan sarana penelitian, dan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan direncanakan dan diarahkan untuk menghasilkan informasi dan teknologi yang mendukung pembangunan sektor perikanan khususnya subsektor perikanan tangkap yang tangguh baik di perairan tawar maupun laut. Berdasarkan mandat dan tupoksi, tujuan dan sasaran BRPSDI ditetapkan berdasarkan output kegiatan yang tertuang dalam kertas kerja RKA-K/L.

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan” dan SS5 “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas”. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1: Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP

SP-2: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDM

Dengan memperhatikan sasaran program tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2026 mengacu pada sasaran strategis: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDM dengan sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan beberapa perubahan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan sebagai pada tahun 2026. Adapun IKS yang dicascadingkan dari Sekretariat BPPSDM KP kepada BRPSDI Jatiluhur, antara lain; a) Penambahan IKS baru yakni “**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)**” dan b) Penghapusan IKS “**Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)**”; Sasaran Kegiatan (SK-1) yang akan dicapai adalah “**Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**”. Indikator Kinerja yang mendukung SK ini antara lain:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 86;
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 92,1;
3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 80;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 71,75;

5. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks), memiliki target tahunan yakni 82,5;
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 77;
7. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 71;
8. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 100;
9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan), memiliki target tahunan yakni 1;
10. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 90;
11. Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target tahunan yakni Rp. 9.680.000;

Sasaran kegiatan BRPSDI berpedoman pada Sasaran kegiatan yang diamanatkan BPPSDM dengan indikator dan target kinerja mengacu pada rancangan indikator dan target kinerja Balai Riset Pemulihan sumber Daya Ikan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4. Rancangan indikator dan target kinerja BRPSDI tahun 2025 - 2029

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)	85	86	87	88	89
	02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
	03	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80	80,5	81	81,5	82
	04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,5	71,5	72	72,5	72,5
	05	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5	82,75	83,0	83,25	83,5
	06	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80	81	82	83	84
	07	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	80	81	82	83	84
	08	Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah)	2.200.00	9.6080.00	10.648.00	11.720.00	12.880.00
	09	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1	1	1	1	1
	10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100	100	100
	11	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90	91	91,5	92	92,5
	12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)		71	71	72	72

Pada tahun 2026 ini terdapat perubahan Indikator Kinerja dimana Indikator Kinerja Tingkat

Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%) yang semula ada di tahun 2025 menjadi tidak ada dan terdapat penambahan indikator baru yaitu Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai).

2.2. Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kegiatan, BRPSDI, maka Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU DIPA AWAL (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI I (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI II (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI III (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI IV (Rp. 000)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.411.805.	5.411.805.	5.411.805.	5.023.508	5.023.508
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2026		5.411.805	5.411.805	5.411.805	5.023.508	5.023.508
Tanggal Pengesahan		1 Desember 2025	31 Desember 2025	19 Februari 2026	23 April 2026	06 Mei 2026

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2026 (DS: 9546-5509-0218-3600), yang setelah disahkan pada tanggal 01 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 5.411.805.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah). BRPSDI telah melakukan 4 (empat) kali revisi pada DIPA TA 2026. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan efisiensi, relaksasi pembukaan blokir dan mempercepat capaian kinerja pada satuan kerja, meningkatkan efektifitas, kualitas belanja, serta optimalisas penggunaan anggaran.

2.3. Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2026

Dalam mencapai sasaran, BRPSDI telah disusun suatu Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja tahunan terdiri atas indikator kinerja kegiatan dan rencana tingkat capaian (target), serta uraian output kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahunan BRPSDI didasarkan pada perjanjian kinerja BPPSDMKP secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Selama periode Triwulan II tahun 2026 ada revisi PK terkait dengan perubahan penggantian atau mutasi pejabat penandatangan dan perubahan pagu anggaran dari **Rp. 5.411.805.000,-** menjadi **Rp 5.023.508.000,-**, akan tetapi Perubahan PK ini tidak mempengaruhi terhadap perubahan indikator dan target kinerja

Tabel 6. Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan	01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	86

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)		92,1
	03	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)		80
	04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)		71.75
	05	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)		82,5
	06	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)		77
	07	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)		71
	08	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)		100
	09	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)		1
	10	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)		90
	11	Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah)		9.680.000

2.4. Pengukuran Kinerja

2.4.1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRPSDI Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah seperti pada gambar 5 berikut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator.

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 5. Indeks Kategori Capaian Kinerja pada Aplikasi Kinerjaaku

2.4.2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BRPSDI dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada penyusunan Laporan Kinerja

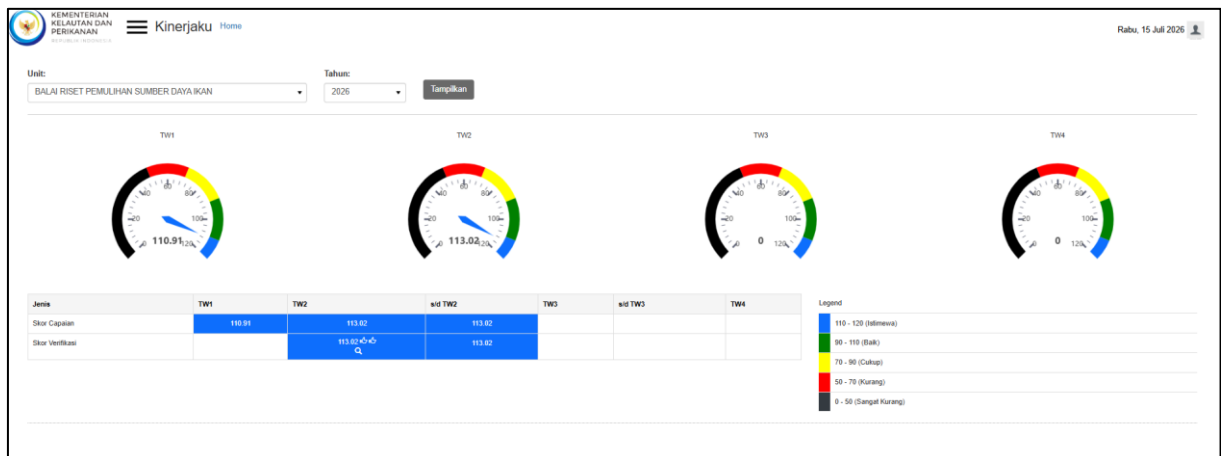
BRPSDI yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BRPSDI Nomor: B.25/BRPSDI/KP.440/II/2026 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2026 dengan dibentuknya Tim Penyusun Laporan kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2026. Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari Kepala Balai selaku Penanggung Jawab, Kepala Sub Bagian Umum sebagai Ketua, , Anggota dan Kontributor. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau langsung oleh Kepala Balai selaku Penanggung Jawab dan Kepala Sub Bagian Umum sebagai ketua Tim Pengelolaan Kinerja, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada kepada Sekretaris BPPSDMKP.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan kegiatan pada peta strategi yang dituangkan pada Perjanjian kinerja BRPSDI Triwulan II tahun 2026 dapat tercapai.

Evaluasi dan analisis kinerja yang dibahas dalam LKj BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 dilakukan berdasarkan dokumen PK BRPSDI Triwulan II Tahun 2026. Pencapaian kinerja berdasarkan dokumen PK BRPSDI telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKSK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/semang/baik) ditentukan oleh NKO. Nilai NKO ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Nilai Kinerja Organisasi BRPSDI pada Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan dokumen PK Tahun 2026 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **113,02 %**, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKU



Gambar 5. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada Dashboard Aplikasi Tahun 2026 per tanggal 15 Juli 2026 Sumber: (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).

Dari sebelas indikator yang ditetapkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh IKSK tersebut telah mencapai target periodik sesuai dengan rencana aksi. Secara Umum, NKO BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 yang telah diukur dapat dikategorikan **Istimewa**. Nilai yang ditargetkan sudah terpenuhi, bahkan sebagian besar melebihi target. Penjabaran detail mengenai capaian IKSK akan dijelaskan secara rinci dalam sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Tabel 7. Hasil Pengukuran Capaian kinerja BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW II 2026		%
				TARGET	REALISASI	
01	Tata Kelola Pemerintahan yang	01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	86	86	100,00

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW II 2026		%
				TARGET	REALISASI	
Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)			
	02		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	83	99,96	120
	03		Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)			
	04		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)			
	05		Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	75	85,28	113,71
	06		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	77	100	120,00
	07		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)			
	08		Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00
	09		Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)			
	10		Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)			
	11		Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah)	4.500.000,00	7.598.544,00	120,00

3.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi BRPSDI. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRPSDI yang menjadi kontrak kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 dapat tercapai.

SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran kegiatan ini BRPSDI berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas” melalui Sasaran Program “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP”. Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersebut dilakukan melalui 11 Indikator Kinerja. Adapun penjabaran IKS tersebut antara lain:

IKSK.01.01. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)

IKSK ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Tahun 2025 s.d. Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BPPSDMKP. IKS Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dikategorikan sebagai IKS yang memiliki tingkat validitas output kendali tinggi. Periode pengukuran IKS ini dilakukan setiap triwulanan.

Capaian indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2026 diambil dari Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor 2801/BPPSDM.1/HP.150/VII/2026 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 lingkup BPPSDM KP” tanggal; 14 Juli 2026, sebagai tindak lanjut keluarnya Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan No.T.582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tanggal 10 Juli 2026. Adapun nilai capaian IKS ini ialah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKS.01.01 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026.

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.01. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)									
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
-	75	82	85	86	86	100%	1	86	100%

Nilai capaian IKS1 Triwulan II tahun 2026 ialah 86. Nilai tersebut merupakan representasi atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan II Tahun 2026 telah

ditindaklanjuti oleh tim secara tuntas. Capaian Triwulan II tahun 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah tetap 100%, begitu pula Nilai Capaian Indikator dengan UPT lain seperti Balai Riset Perikanan Laut yang merupakan sama sama exs riset dan UPT yang lain seperti Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan memperoleh nilai yang sama, hal ini dikarenakan BRPSDI tidak termasuk satker yang melaksanakan uji petik pengawasan Itjen.

IKSK ini didukung oleh penggunaan anggaran pada RO Layanan Manajemen Keuangan: Pelayanan Keuangan Riset Perikanan dan RO Layanan Perkantoran: Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor dimana kedua RO ini juga mendukung pencapaian pada IKS Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI. Nilai Capaian Indikator pada IKS ini apabila dibandingkan dengan UPT lain seperti Balai Riset Perikanan Laut yang merupakan sama sama exs riset dan UPT yang lain seperti Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan memperoleh nilai yang sama

Pencapaian indikator tersebut didorong oleh **faktor keberhasilan** berupa adanya komitmen jajaran pimpinan serta seluruh pegawai BRPSDI dalam mengelola siklus anggaran secara komprehensif. Pengelolaan ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan yang dilaksanakan secara konsisten dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan, akuntabilitas, profesionalisme, proporsionalitas, serta kewajaran.

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas merupakan elemen krusial dalam memastikan implementasi rekomendasi hasil pengawasan secara efektif. Hal ini berperan strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi serta memitigasi risiko terjadinya temuan di masa mendatang. Keberhasilan pencapaian IKS ini juga didukung oleh **kegiatan pendukung** berupa keterlibatan aktif Kepala BRPSDI melalui pemantauan berkelanjutan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 9. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%) lingkup BPPSDMKP TW II Tahun 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU				
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDMKP				
Triwulan II Tahun 2026				
No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BRSDM	7	7	100,00
2	Pusat Pendidikan KP	1	1	100,00
3	Pusat Pelatihan KP	0	0	0,00
4	Pusat Penyuluhan KP (Eks Pusriskel)	15	15	100,00
5	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM KP	0	0	0
6	BBRP2BKP	0	0	0
7	BBRSEKP	0	0	0

No	Satker	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	BRPI Sukamandi	8	8	100,00
2	BPPP Tegal	4	4	100,00
3	BPPP Ambon	5	5	100,00
4	BPPP Bitung	1	1	100,00
5	SUPM Tegal	4	4	100,00
6	POLTEK KP Karawang	13	13	100,00
7	POLTEK KP Dumai	6	6	100,00

Data Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" Periode Triwulan II Tahun 2026						
No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Jenderal	43	43	100,00	0	0,00
2	Ditjen PK	115	105	91,30	10	8,70
3	Ditjen PRL	13	13	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	115	99	86,09	16	13,91
5	Ditjen PSDKP	89	89	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	170	165	97,06	5	2,94
7	BPPSDMKP	64	64	100,00	0	0,00
8	Ditjen PDSPKP	29	29	100,00	0	0,00
9	BPPMHKP	27	27	100,00	0	0,00
10	Inspektorat Jenderal	7	7	100,00	0	0,00
TOTAL		672	641	95,39	31	4,61

Berdasarkan Nota Dinas tersebut untuk selain UPT yang tindak lanjut hasil pengawasan ltjen seperti pada Tabel 9 merupakan UPT ((termasuk BRPSDI) yang tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas sebelum pengukuran Triwulan II, sehingga capaian IKU-nya adalah 100%.

IKSK.01.02. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 3 (tiga) komponen meliputi Kualitas Perencanaan Anggaran (Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas pelaksanaan anggaran (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Pengelolaan UP dan TUP), serta Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output) dan Indikator Dispensasi SPM sebagai pengurang.

IKSK ini ditetapkan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BRPSDI yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKS ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen).

Tabel 10. Capaian IKS.01.02 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK-01.02. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025- 2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
89	93,75	93,76	92	83	99,96	120	3,96	92,1	92,1

IKSK Nilai IKPA BRPSDI pada periode Triwulan II ini sebesar 99,96 berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Inspektorat Jenderal KKP Nomor 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026, dikarenakan IKS ini bersifat Semesteran jadi hanya bisa dilakukan pada semester I dan semester II. Penilaian IKS ini menggunakan instrumen dari Kementerian Keuangan, yaitu aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Administrasi Negara) pada website (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>). Hasil penilaian IKS tersebut disampaikan oleh Biro Keuangan melalui Nota Dinas Sekjen KKP. Pada Triwulan II tahun 2026 BRPSDI memperoleh nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 99,96, apabila dibandingkan dengan UPT lain seperti Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) sebesar 98,88 yang merupakan sama sama exs riset dan UPT yang lainnya seperti Loka Perikanan Teknologi Kelautan (LPTK) yang memperoleh nilai capaian sebesar 97,73

Capaian nilai IKPA BRPSDI pada Triwulan II tahun 2026 dipengaruhi oleh sejumlah **faktor pendukung**, diantaranya adalah penyerapan anggaran yang optimal, pengelolaan UP dan TUP yang baik, serta penyelesaian tagihan. Dengan optimalnya penilaian pada paramater tersebut capaian nilai IKPA BRPSDI Triwulan II ini berhasil melampaui target. Meskipun demikian, nilai pada deviasi halaman III DIPA masih belum optimal dikarenakan banyaknya revisi anggaran karena kebijakan yang dilakukan selama periode tahun 2026. Hal ini tentu menjadi catatan untuk evaluasi perbaikan kedepan. Selain itu, terdapat pula **kegiatan pendukung** yang mendorong tercapainya input IKPA, yaitu diantaranya adalah kegiatan pembaruan capaian RO yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan aspek kualitas pelaksanaan anggaran dapat dipantau secara konsisten, dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan terhadap nilai IKPA melalui aplikasi OM-SPAN untuk memastikan perkembangan capaian IKPA setiap bulannya, serta ketepatan dalam pengelolaan UP dan TUP.

IKSK.01.03. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Dokumen bukti dukung penilaian mandiri SAKIP adalah Surat hasil verifikasi penilaian mandiri SAKIP dari Sekretariat BPPSDM KP yang akan diukur pada periode tahunan, oleh karena itu IKS ini belum dapat diukur di periode Triwulan II.

Tabel 11. Capaian IKS.01.03 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
IKSK-01.03. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)

Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025- 2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
-	78	78,5	80	-	-	-	-	88,2	-

IKSK.01.04. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

IKSK ini didefinisikan sebagai nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 12. Capaian IKS.01.04. BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK01.04. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)*									
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025- 2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
81	82	71	71,5	-	-	-	-	71,75	-

*Tahun 2022-2023 nama IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Tahun 2024 berubah formulasi menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

IKSK ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen). IKS ini diukur pada periode penilaian tahunan sehingga belum dapat diukur pada Triwulan II.

IKSK.01.05. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pada Triwulan II tahun 2026 BRPSDI memperoleh nilai yang rendah yaitu sebesar 85,28, apabila dibandingkan dengan UPT lain seperti Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) sebesar 87,30 yang merupakan sama sama eks riset dan UPT yang lainnya seperti Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) yang memperoleh nilai capaian sebesar 90,24 hal ini dikarenakan pada triwulan II ini hanya beberapa pegawai yang melengkapi atau mengupload sertifikat Jam Pembelajaran (JP) serta Sertifikat Webinar.

Nilai capaian indeks profesionalitas ASN diperoleh dari jumlah nilai kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN. Nilai kesesuaian kualifikasi pendidikan dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar pada pegawai. Nilai kompetensi dapat ditingkatkan dengan mengirimkan pegawai pada diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat teknis dan fungsional untuk fungsional umum dan pejabat fungsional, serta seminar untuk pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan nilai kedisiplinan ditentukan berdasar ada tidaknya hukuman disiplin yang dikenakan pada pegawai.

Tabel 13. Capaian IKS.01.05 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
IKSK.01.05. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)								
Realisasi TW II 2022-2025			2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023 2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
74	80 82	82,5	75	85,28	113,71	2,78	81,5	-

Pengukuran IKS Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi ropeg KKP (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2026>) dan diukur dalam periode semesteran. Dengan demikian, capaian IP-ASN belum dapat diukur pada periode Triwulan II.

Capaian nilai IKS IP ASN ini didukung oleh adanya **Faktor pendukung** berupa jenjang pendidikan pegawai BRPSDI dimana pegawai ASN dengan tingkat pendidikan S1 dan S2. Selain itu peran aktif pegawai dalam pemenuhan diklat 20 JP untuk PNS dan 24 JP untuk PPPK dan seminar serta skor predikat kinerja sangat baik berpengaruh signifikan pada pencapaian target nilai IP-ASN pada Triwulan II ini. Capaian IKS IP ASN juga memiliki kegiatan pendukung dalam memperoleh target capaian nilai

IP-ASN berupa ketersediaan fasilitas perkantoran yang mendukung pegawai dalam memfasilitasi keikutsertaan pelatihan dan seminar secara daring

IKSK.01.06. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)

IKSK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPSDI didefinisikan sebagai Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Dasar Hukum: Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. .

Pengukuran IKS 6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) diperoleh Nilai Capaian indikator kinerja pada pada Triwulan II tahun 2026 yaitu sebesar 100 atau 120% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Nomor B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal "Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan II Tahun Anggaran 2026" dan Nota Dinas Sekretaris BPPSDMKP Nomor 2798/BPPSDM.1/PL.410/VII/2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Triwulan II Tahun Anggaran 2026 tanggal 13 Juli 2026.

Tabel 14. Capaian IKS.01.06 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.06. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)									
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025- 2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
-	-	-	80	77	100	120	20	77	

Pada Triwulan II tahun 2026 ini, BRPSDI berhasil memperoleh nilai capaian 100 dari target yang ditentukan sebesar 77. Prosentase capaian pada IKS ini sebesar 120%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2025 dimana pada tahun 2025 diperoleh nilai 100 (120%). Namun demikian, nilai ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2024) dikarenakan IKS ini adalah IKS

baru yang dicascadingkan tahun 2025.

Tabel 15. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) BPPSDMKP Triwulan II tahun 2026

(12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – 42 Satker									
No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			TOTAL PAGU PENGADAAN	Setelah	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL				
	12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	791,179,000		791,179,000	791,179,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	6,529,483,000		6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRP28KP	3,136,163,000		3,136,163,000	3,136,163,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BRSEKP	1,109,213,000		1,109,213,000	1,109,213,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	13,754,039,000		13,754,039,000	13,754,039,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,541,150,000		3,541,150,000	3,541,150,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	12,257,656,000		12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	4,417,477,000		4,417,477,000	4,417,477,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	34,574,253,000		34,574,253,000	34,574,253,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	3,109,166,000		3,109,166,000	3,109,166,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBHI	2,603,171,000		2,603,171,000	2,603,171,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	403832	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN BRPI	2,868,683,000		2,868,683,000	2,868,683,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,736,888,000		1,736,888,000	1,736,888,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBAY3	4,919,286,000		4,919,286,000	4,919,286,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRBATPP	5,139,080,000		5,139,080,000	6,146,393,000	(1,007,313,000)	83.61%	KURANG TERUMUMKAN
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,237,000		904,237,000	904,237,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPPUPP	6,112,923,000		6,112,923,000	6,112,923,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

Capaian Triwulan II tahun 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah tetap 100%, begitu pula Nilai Capaian Indikator dengan UPT lain seperti Balai Riset Perikanan Laut yang merupakan sama sama eks riset dan UPT yang lain seperti Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan juga memperoleh nilai yang sama sebesar 100 %

Pencapaian IKSK ini didukung oleh **faktor pendukung** diantaranya efektivitas proses identifikasi serta inventarisasi data terkait efisiensi maupun penyesuaian anggaran pada belanja pengadaan. Data tersebut didokumentasikan secara sistematis dalam kertas kerja (format Excel) sebagai bahan pendukung utama dalam proses klarifikasi usulan penyesuaian Pagu Pengadaan. Sebagai langkah akhir, dokumen tersebut diunggah ke dalam sistem informasi (SIRUP) untuk mendukung validasi data pada tahap klarifikasi dan rekonsiliasi.

Pencapaian IKSK 6 juga diperkuat beberapa **kegiatan pendukung** yaitu pelaksanaan revisi DIPA/RKA-KL yang ditindaklanjuti dengan sinkronisasi data pada aplikasi SIRUP melalui penyesuaian paket penyedia. Proses pemutakhiran ini tidak hanya bertujuan untuk menata ulang informasi dalam sistem, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan validitas data serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah.

IKSK.01.07. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal

dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Tabel 16. Capaian IKSK.01.07 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.07. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025- 2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
-	-	-	80	-	-	-	-	81	-

Pengukuran IKSK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai) diukur dalam periode Tahunan. Dengan demikian, capaian ini belum dapat diukur pada periode Triwulan II.

IKSK.01.08. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)

IKSK ini didefinisikan sebagai 'Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

IKSK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) bersifat Triwulanan, dengan tingkat validasi IKU output kendali tinggi. Bukti dukung capaian IKSK ini adalah Dokumen layanan dukungan manajemen internal satker yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang mendapatkan pengesahan dari Koordinator/Sub Koordinator dan ditandatangani pimpinan satker.

IKSK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) Triwulan II Tahun 2026 sebesar 100%. Nilai capaian tersebut sama dengan tahun 2022, 2023, 2024, dan

2025 dimana BRPSDI juga mencapai nilai 100. Apabila dibandingkan dengan UPT yang lain seperti Balai Riset Perikanan Laut yang merupakan sama sama exs riset dan UPT yang lain seperti Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan juga memperoleh nilai yang sama sebesar 100 %. Nilai Capaian tersebut merupakan representasi dari kegiatan yang sudah terlaksana dan telah menghasilkan output berupa laporan kegiatan.

Capaian IKSK 8 terkait Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya pada Triwulan II Tahun 2026 ditunjang oleh **Faktor pendukung** diantaranya adalah pelaksanaan dialog kinerja yang berperan penting dalam penyediaan dokumen pelaporan yang disusun oleh setiap pegawai sesuai dengan RHK. Selain itu, peran aktif pegawai dalam mengupayakan ketersediaan dokumen pelaporan pada waktu yang telah ditentukan juga merupakan penentu keberhasilan capaian IKSK ini.

Tabel 17. Capaian IKSK.01.08. BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK01.08. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)									
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
100	100	100	100	100	100	100%	0%	100	100%

Beberapa **kegiatan pendukung** dalam pencapaian target IKSK ini adalah pelaksanaan kegiatan rapat dan pertemuan yang diadakan dalam pelaksanaan kegiatan, pembaruan data pelaporan melalui aplikasi e-SR Menpan, serta website berperan signifikan dalam meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan.

Tabel 18. Hasil Perhitungan Capaian IKSK.01.08 Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

TABEL PERHITUNGAN PEMENUHAN DOKUMEN
IKSK.01.08 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI
Triwulan II Tahun 2026

No	Jenis Laporan	B01		B02		B03		S.D. Triwulan II		Persentase (%)	Bukti Dukung
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
1	Laporan Mingguan	4	4	4	4	4	4	24	24	100	https://drive.google.com/drive/folders/1kupeR2d1OoLaF3-M585ma4cMlyk47Z9?usp=drive_link
2	Laporan Bulanan										
	a. Laporan Manajerial	1	1	1	1	1	1	6	6	100	https://drive.google.com/drive/folders/2VPO5bAvyNsbPn2FO0xhFu19T53R7pNm?usp=drive_link
	b. Laporan Realisasi Keuangan	1	1	1	1	1	1	6	6	100	https://drive.google.com/drive/folders/1C21456DZ3Da5GOK07n11J181TTC7iSwS?usp=drive_link
	c. Laporan Penanganan pengaduan lingkup BRPSDI	1	1	1	1	1	1	6	6	100	https://drive.google.com/drive/folders/1P7ohlrXBjEdmZYXIO9tFjgr3k5lk43?usp=drive_link
3	Laporan Triwulanan										
	a. Laporan Kinerja (LKj)	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1m1QYBmj08IH-VQ22ubcLnGvjfn7633?usp=drive_link
	b. Laporan SPIP	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1BxmSet7zFg5EtKg9p-TsA-

No	Jenis Laporan	B01		B02		B03		S.D. Triwulan II		Persentase (%)	Bukti Dukung
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
											ev05AIm_sS?usp=drive_l ink
	c. Laporan Kegiatan Jabatan Fungsional	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1mLQYRmj08lIH-VQ22ubcLnGYjfn7633?usp=drive_link
	d. Laporan PPID	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1shnnCWbQn0EDgmrK3aJREI76ZLctIWJO?usp=drive_link
	e. Laporan Pelayanan Publik	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1K24wNUZ5LNvUFIulzEQGfouu5EEQjr12?usp=drive_link
	f. Laporan Humas dan Data	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1UXYl43RjI48o_dEQbv7DYWS5k5NycrU?usp=drive_link
TOTAL JUMLAH								54	54	100	

Tabel 19. Capaian Dukungan Manajemen lingkup BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Target	Capaian	%
1	Balai Riset Perikanan Laut	100	100	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
3	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	100	100	100
4	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
5	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
6	Balai Riset Pemuliaan Ikan	100	100	100
7	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	100	100	100
8	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
9	Loka Riset Perikanan Tuna	100	100	100
10	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	100	100	100
11	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	100	100	100

IKSK.01.09. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)

IKSK ini didefinisikan sebagai Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara BRPSDI dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN BRPSDI mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP, PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN, dan Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian.

BRPSDI pada tahun 2026 berhasil menjalin kemitraan sebanyak 1 kesepakatan kemitraan yaitu kesepakatan kemitraan dengan FST-Universitas Terbuka. Capaian kegiatan Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan) merupakan salah satu IKS yang diukur dalam periode tahunan sehingga belum dapat diukur pada periode Triwulan II.

Tabel 20. Capaian IKS.01.09 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.09. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)									
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
2	2	2	2	-	-	-	-	1	-

IKSK.01.10. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)

Keterbukaan informasi publik didefinisikan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik instansi pemerintah adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Capaian IKS ini diukur melalui beberapa parameter penilaian diantaranya adalah aspek sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, inovasi dan strategi. Metode penilaian dengan menggunakan skala pembobotan untuk menentukan atau menetapkan kategori yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Tabel 21. Capaian IKS.01.10 BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.10. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
-	-	-	100	90	-	-	-	90	-

Capaian kegiatan Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI merupakan salah satu IKS yang diukur dalam periode tahunan sehingga belum dapat diukur pada periode Triwulan II.

IKSK.01.11. Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)

IKSK Nilai PNBP didefinisikan sebagai manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Adapun Objek/Ruang Lingkup PNBP diantaranya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Tabel 22. Capaian IKS.01.11 Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan								
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
IKSK.01.11. Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)								
Realisasi TW II 2022-2025				2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	% Capaian thd target 2026
-	2.985.120	4.813.840	22.182.249 (120 %)	4.500.000	7.598.544	120%	-	9.680.000

IKSK nilai PNBP termasuk dalam IKS yang memiliki komposisi validitas Output Kendali Rendah, sedangkan untuk periodisasi waktu pengukuran dari IKS ini ialah triwulanan. Data dukung/bukti capaian yang disepakati ialah data realisasi PNBP yang diperoleh melalui aplikasi OMSPAN dan Surat Penyampaian Capaian IKS PNBP dari Kepala BRPSDI kepada Sekretaris BPPSDMKP. Berdasarkan data pada tabel diatas, target nilai PNBP pada Triwulan II tahun 2026 sebesar Rp. 4.500.000,00,- dan berhasil dicapai dengan nilai capaian IKS Nilai PNBP BRPSDI Triwulan II Tahun 2026 yakni sebesar Rp. 7.128.544,00,- yang diperoleh s.d 30 Juni 2026.

Tabel 23. Capaian Nilai PNBP lingkup BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2026

NO	SATKER	TARGET DIPA (Rp)	REALISASI CAPAIAN (Rp)	% CAPAIAN PNBP	MP 1 PNBP (Rp)	REALISASI SALDO MP (Rp)	% REALISASI SALDO MP	USA SALDO MP (Rp)
1	626402 SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1.176.621.331	-	-	-	-	-
2	601629 PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	46	-	-	-	-	-
3	627582 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	0	72.387.055	-	-	-	-	-
4	627630 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	0	87.886.184	-	-	-	-	-
5	603821 PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	12.400.900	-	-	-	-	-
6	603826 LOKA RISET PERIKANAN TUNA	0	18.860.000	-	-	-	-	-
7	603834 LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	0	22.354	-	-	-	-	-
8	603836 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	2.253.258	-	-	-	-	-
9	603822 BALAI RISET PERIKANAN LAUT	0	2.250.000	-	-	-	-	-
10	603835 BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.740.000	53.836.120	1135,78%	-	-	-	-
11	603820 LOKA PEMERIKSAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	3.344.000	6.326.837	189,21%	-	-	-	-
12	239260 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	201.600.000	292.131.423	144,81%	64.512.000	64.508.350	99,98%	3.650
13	603823 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	45.000.000	51.281.589	113,96%	14.399.600	14.319.000	99,44%	80.600
14	603834 BRPSDI RISET PERIKANAN TUNA	474.000.000	739.124.259	155,93%	-	-	-	-
15	603834 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	6.680.000	7.128.544	106,71%	-	-	-	-
16	603875 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN (DUMAI) (POLTEK KP DUMAI)	109.201.000	76.901.627	70,42%	34.943.600	34.899.763	99,87%	43.837
17	603877 BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	379.630.000	261.275.946	68,85%	185.481.600	185.481.000	100,00%	400
18	237773 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TIGAL	298.400.000	199.012.000	66,69%	95.500.200	94.034.277	98,46%	1.465.923
19	238741 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	520.030.000	319.879.550	61,51%	166.395.600	99.999.800	60,10%	66.395.800
20	603838 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	219.699.000	113.173.235	51,56%	70.303.200	70.303.200	100,00%	-
21	239138 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TIGAL	22.523.900.000	13.495.357.817	59,90%	159.599.200	159.384.900	99,87%	214.300
22	237618 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAHERU	498.750.000	270.388.245	54,21%	159.599.200	159.384.900	99,87%	214.300
23	238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	822.355.000	421.746.701	51,29%	263.153.600	257.258.000	97,76%	5.895.600
24	240031 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN (JEMBER) (POLTEK KP JEMBER)	610.250.000	279.586.261	45,81%	155.280.000	155.280.000	100,00%	-
25	238030 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	471.000.000	194.578.084	41,31%	150.737.200	150.737.200	100,00%	-
26	603826 BALAI PENYULUHAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1.027.840.000	380.473.107	37,02%	318.908.800	318.640.000	99,92%	268.800
27	627551 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LACONG	127.220.000	50.462.620	39,67%	40.710.400	40.600.000	99,73%	110.400
28	627575 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARANGMAMBA	3.378.954.000	466.309.390	13,80%	443.768.800	396.481.000	89,35%	44.583.800
29	602205 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	15.517.500.000	5.377.356.523	34,65%	-	-	-	-
30	627511 POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK KP JAKARTA)	2.884.354.000	841.096.120	29,16%	923.056.800	631.964.248	68,46%	291.092.552
31	603837 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	265.049.000	74.337.288	28,05%	84.815.600	84.815.600	100,00%	-
32	603829 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BOJONE	404.250.000	113.325.767	28,03%	129.360.000	67.006.500	51,86%	62.353.500
33	603828 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	1.630.527.000	436.277.177	26,76%	511.767.600	520.888.400	99,83%	8.912.000
34	238755 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	951.783.000	228.187.782	23,97%	304.570.400	261.612.038	85,93%	42.958.362
35	234146 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	822.000.000	67.255.785	8,07%	109.045.200	-	-	309.045.200
36	603833 LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	30.008.000	6.796.387	22,65%	-	-	-	-
37	603830 BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	220.500.000	37.558.460	17,03%	-	-	-	-
38	603825 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBU (AK KP WAKATOBU)	18.374.000	1.200.000	6,53%	5.879.600	-	-	5.879.600
39	603209 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH ROTA AGUNG LAMPUNG	656.480.000	16.936.403	2,58%	210.073.600	194.001.000	92,35%	16.072.600
40	603817 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESIR	92.700.000	2.187.596	2,35%	-	-	-	-
41	603879 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	384.327.000	5.999.860	1,56%	122.977.600	49.897.500	40,57%	73.080.100
	GRAND TOTAL	58.448.769.000	26.515.926.664	45,36%	4.646.689.200	3.932.331.776	84,43%	734.827.424

Target nilai PNBPN pada Triwulan II tahun 2026 sebesar Rp. 4.500.000,-. Nilai capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan penerimaan PNBPN pada periode Triwulan II tahun sebelumnya hal ini dikarenakan pada Triwulan II tahun 2025 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 22.182.249,-. Capaian PNBPN BRPSDI telah diumumkan dalam Nota dinas dari Sekretariat BPPSDMKP NOMOR 2521/BPPSDM.1/KU.340/VI/2026 tanggal 25 juni 2026 tentang Penyampaian Proyeksi Penerimaan PNBPN Tahun 2026.

Faktor pendukung dalam peningkatan capaian PNBPN sepanjang tahun 2026 terutama dipengaruhi oleh keberlanjutan permintaan jasa sewa alat survei BRPSDI dari berbagai lembaga, hal ini menjadi pendorong utama yang memastikan pendapatan PNBPN dapat berjalan stabil sepanjang tahun. Beberapa **Kegiatan pendukung** yang ikut memperkuat pencapaian target PNBPN diantaranya adalah Kegiatan magang mahasiswa/taruna dan kehumasan memberikan tambahan eksposur terhadap layanan BRPSDI sekaligus memperluas jaringan pemanfaat jasa yang berdampak pada peningkatan PNBPN dari jasa analisa dan sewa sarpras. Peningkatan PNBPN dari penjualan aset BMN yang rusak diperoleh melalui proses lelang yang berkoordinasi dengan KPKNL Purwakarta untuk meningkatkan capaian PNBPN.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2026 (DS: 9546-5509-0218-3600) yang setelah disahkan pada tanggal 01 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.411.805.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah). Selama periode Triwulan II tahun 2026 BRPSDI telah melakukan 2 (Dua) kali revisi DIPA pada DIPA TA 2026. Berikut merupakan kronologis revisi DIPA yang telah dilakukan BRPSDI pada Tahun 2026.

Tabel 24. Tabel Kronologi Revisi Anggaran BRPSDI Triwulan II Tahun 2026

DIPA Revisi ke-	Tanggal DIPA	Pagu (Rp. 000)	Nomor Pengesahan	Keterangan Revisi
1	31 Desember 2025	Rp. 5.411.805.000	SP DIPA-032.12.2.403824/2026 (DS: 1557-9401-0407-8459)	Adanya pergeseran anggaran ke RO Khusus dan penghapusan/pencantuman catatan pada Halaman IV. Hal ini tersebut telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbarui. Program RO khusus pada BRPSDI dituangkan pada RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden sebesar (Kode: 2376.FAN.ZZ1) sebesar Rp. 358.431.000,-. Revisi anggaran tidak mengakibatkan perubahan total pagu DIPA BRPSDI TA 2026

II	19 Februari 2026	Rp. 5.411.805.000	SP DIPA-032.12.2.403824/2026 (DS: 1557-9401-0407-8459)	Adanya perubahan/ralat karena kesalahan administrasi Mekanisme revisi yang dilakukan dengan ralat rencana penarikan dana. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran untuk mempercepat capaian kinerja satuan kerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas
III	23 April 2026	Rp 5.023.508.000	SP DIPA-032.12.2.403824/2026 (DS:0209-8063-0073-7075)	Adanya kebijakan penajaman belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2026 berupa Efisiensi Anggaran
IV	06 Mei 2026	Rp 5.023.508.000	SP DIPA-032.12.2.403824/2026 (DS:0209-8063-0073-7075)	Adanya pergeseran antar-RO dan/atau dalam RO yang sama dalam KRO yang sama dan perubahan rencana penarikan dana dan/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA sehingga diharapkan mempercepat capaian kinerja satuan kerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas

Tabel 25. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II tahun 2026

Jumlah realisasi keuangan BRPSDI berdasarkan aplikasi OMSPAN/SAKTI per tanggal 30 Juni 2026 ialah **54.29 %** atau **Rp. 2,727,228,819,-** yang terbagi ke dalam dua jenis belanja anggaran, yakni belanja pegawai (51) **Rp. 1,770,628,831,-** atau **55,14 %** dan belanja barang (52) **Rp. 956.599.988,-** atau **55,78%.**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			REALISASI ANGGARAN %	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETO		
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8 = 5/4	9 = 4-7
A	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	Rp 3,210,969,000	Rp3,210,969,000	Rp 1,770,628,831	-	Rp1,770,628,831	55%	Rp 1,440,340,169
B	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	Rp 2,200,836,000	Rp1,812,539,000	Rp 525,650,350	-	Rp 525,650,350	29%	Rp 1,286,888,650
	JUMLAH BELANJA	Rp 5,411,805,000	Rp 5,023,508,000	Rp 2,296,279,181	-	Rp 2,296,279,181	84%	Rp 2,727,228,819

Tabel 26. Realisasi Anggaran BRPSDI per IKS Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	86	86	100,00%	Layanan Manajemen Keuangan: Pelayanan Keuangan Riset Perikanan	Rp. 910.000	Rp. 910.000	100,00%
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	83	99,96	120,00%				
	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)				Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan	Rp. 720.000	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)							
	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	75	85,28	113,71%	Layanan Manajemen SDM: Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan	Rp. 1.770.000	Rp. 1.727.500	97,60%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	77	100	120,00%	Layanan BMN untuk satker vertical(Eselon II kebawah) Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara Riset Perikanan	Rp. 2.670.000	Rp. 2.370.000	88,76%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)				Layanan Umum Pelayanan Umum Unit Kerja Riset Perikanan	Rp. 8.077.000	Rp. 4.770.850	59,07%
	Nilain PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	4.500.000	7.598.544	120,00%				
	Presentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI(%)	100	100	100%	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 5.006.901.000	Rp. 2.716.000.969	54,25%
	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti				Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Untuk Satker Vertikal (Eselon II kebawah)	Rp. 2.460.000	Rp. 1.449.500	58,92%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	BRPSDI (Kemitraan)							
	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)							
TOTAL				113,02%		Rp. 5.023.508.000	Rp. 2.727.228.819	54,29%

3.4. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan BRPSDI pada Triwulan II tahun 2026 dilakukan seefisien mungkin dengan memperhatikan efisiensi baik dalam penggunaan anggaran, sumberdaya manusia, dan aset. Pada tahun 2026, dari 11 Indikator kinerja yang berhasil dicapai sesuai target berhasil diperoleh efisiensi anggaran sebesar 13,4% yang diperoleh dari presentase capaian kinerja 112,76% dan realisasi anggaran sebesar 99,36%. Secara rinci efisiensi anggaran dalam pencapaian per indikator kinerja telah disajikan dalam narasi sub pembahasan Evaluasi dan Analisa Kinerja. Capaian efisiensi anggaran ini berhasil dicapai melalui perencanaan kinerja yang baik, pelaksanaan kegiatan serta pemanfaatan sumberdaya secara optimal. Oleh karena itu, dalam mendukung tercapainya efisiensi anggaran, BRPSDI juga melakukan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan aset yang tersedia.

Efisiensi Sumber Daya Manusia

Selain efisiensi dalam aspek penggunaan anggaran BRPSDI juga melakukan efisiensi pada aspek lain. Efisiensi penggunaan tenaga kerja/SDM dilakukan dengan melibatkan mantan teknisi litkayasa untuk aktif berperan sebagai operator peralatan survei dan laboratorium, guna meningkatkan kinerja BRPSDI. Dengan langkah ini, beberapa indikator kinerja, seperti nilai PNBP dan kemitraan, dapat dicapai secara efisien.

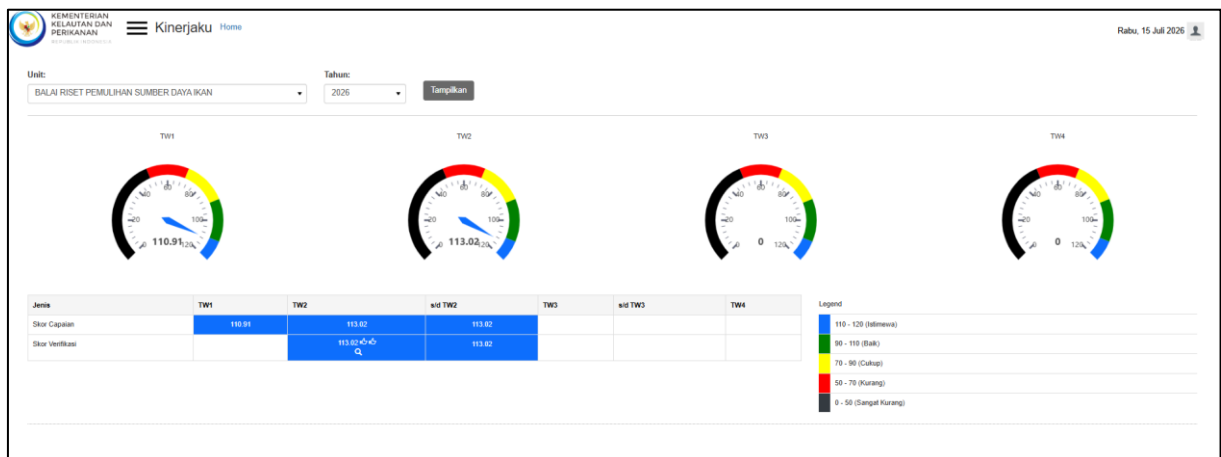
Efisiensi Aset

Pengoperasian peralatan eks-riSET yang dimiliki memungkinkan peningkatan efisiensi aset, baik melalui penyewaan alat laboratorium, alat survei, maupun guesthouse untuk mendukung nilai PNBP, ataupun melalui kerja sama kemitraan. Ditambah lagi, infrastruktur kantor yang ada, seperti ruang aula pertemuan, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan pertemuan di lingkungan BPPSDMKP.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tugas dan fungsi BRPSDI dalam mendukung BPPSDMKP dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Beberapa Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) telah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan aplikasi eksternal (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja) atau Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>). Berdasarkan hasil pengukuran Kinerjaku, capaian kinerja BRPSDI menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar **112,98%** dengan status Istimewa (warna biru). Pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II tahun anggaran 2026, BRPSDI berhasil mencapai realisasi anggaran berdasarkan aplikasi MyIntress sebesar **54.29 % Rp. 2,727,228,819,-** yang terbagi ke dalam dua jenis belanja anggaran, yakni belanja pegawai (51) **Rp. 1,770,628,831,-** atau **55,14 %** dan belanja barang (52) **Rp. 956.599.988,-** atau **55,78%** dari pagu anggaran efektif total Rp. 5.260.575.000 dari pagu semula **Rp 5.023.508.000,-**



Gambar 6. Indikator Capaian Kinerja pada Aplikasi Kinerjaku

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK). Dari 11 IKSK yang disepakati, IK yang dapat diukur pada periode Triwulan II tahun 2026 yakni 6 (empat) IKSK. Hasil validasi yang telah dilakukan, keempat IKSK tersebut telah memenuhi target periodik yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi. Data dukung capaian BRPSDI yang memuat capaian 6 IKSK telah diunggah melalui tautan : https://bit.ly/BPRSDI_CapaianTW12026. Adapun IKSK tersebut, antara lain:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%), memiliki target Triwulan II yakni 86, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 86 (100,%);
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (nilai), memiliki target Triwulan II yakni 83, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 99,96 (120%)
3. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks), memiliki target Triwulan II yakni 75, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 85,14 (113, 52%)
4. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%),

- memiliki target Triwulan II yakni 77, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%)
5. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target Triwulan II yakni 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (100%)
 6. Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target Triwulan II yakni sebesar Rp. 4.500.000,-, dan sudah tercapai dengan nilai capaian sebesar Rp. 7.128.544,00 (120%).

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BRPSDI Triwulan II tahun 2026 mempunyai nilai yang lebih tinggi dengan periode Triwulan II tahun sebelumnya (TW II TA 2025) sebesar **0,79** hal ini dikarenakan dari 6 IKS ini sebanyak 3 IKS berhasil mencapai nilai optimum dengan prosentase 120% dan 2 IKS memperoleh nilai maksimum dengan prosentase 100% dan 1 IKS dengan nilai 113,52, hal inilah yang menjadikan nilai NKO pada Triwulan II tahun 2026 lebih tinggi dengan periode ditahun triwulan sebelumnya.

4.2. Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut

Pelaksanaan kegiatan BRPSDI dalam memenuhi atau mencapai target tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala maupun masalah baik teknis maupun non teknis. Secara umum kendala-kendala tersebut sudah berhasil diatasi. Berikut merupakan permasalahan yang muncul selama periode Triwulan II Tahun 2026:

Tabel 27. Permasalahan, Rekomendasi dan Tindaklanjut Triwulan II Tahun 2026

Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Pencapaian indikator kinerja IP ASN masih perlu ditingkatkan terutama pada komponen pemenuhan jam pembelajaran	1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap indikator kinerja dengan target triwulanan; 2. Melakukan verifikasi dan validasi secara berkala guna memastikan capaian indikator kinerja sesuai dengan bukti dukung.	

4.3. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi TW I Tahun 2026

Sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja tahun 2026, BRPSDI telah melakukan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 28. Permasalahan, Rekomendasi dan Tindaklanjut Triwulan II Tahun 2026

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap indikator kinerja dengan target triwulanan;	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada kegiatan atau aspek pendukung indikator	1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan atau

2. Melakukan verifikasi dan validasi secara berkala guna memastikan capaian indikator kinerja sesuai dengan bukti dukung.	kinerja sehingga realisasi capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 2. Melaksanakan verifikasi dan validasi capaian indikator kinerja beserta data dukungnya secara berkala	aspek pendukung indikator kinerja secara berkala 2. Verifikasi dan validasi capaian indikator kinerja beserta data dukungnya sudah dilaksanakan secara berkala
---	--	--

4.4. Saran

BRPSDI pada periode Triwulan II tahun 2026 berhasil memperoleh capaian kinerja pada katagori Istimewa, hal ini menunjukan kinerja yang sangat baik. Namun demikian, dalam rangka melakukan perbaikan kedepan beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain adalah melakukan verifikasi, validasi, dan pemantauan berkala terkait ketercapaian setiap indikator kinerja, serta melakukan koordinasi yang intensif dengan bagian terkait pada tingkat sekretariat BPPSDM dalam penyelesaian permasalahan.

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Tugas Pengelola Kinerja BRPSDI 2026

	
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT TELEPON (0264) 750902, SUREL brpsdi@kkp.go.id	
SURAT TUGAS B.25/BRPSDI/KP.440/I/2026	
Menimbang :	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah; b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025
Dasar :	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
DIPERINTAHKAN:	
Kepada :	NAMA DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk

1. Di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada Tahun Anggaran 2026;
2. Masa Kerja Tim Pengelolaan Kinerja pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dihitung sejak Surat Tugas ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan TA. 2026.

Purwakarta, 9 Januari 2026
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran I
 Nomor : B.25/BRPSDI/KP.440/I/2026
 Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
2.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum
3.	Anggota	Riswanto, S.Kel., M.Si Indriatmoko, S.Kel., M.Si Dimas Angga Hediarto, S.Pi., M.Si Rakhmat Sarbini Yusup Nugraha
4.	Kontributor	Tatok Priswanto, SE Dyah Ika Kusumaringtyas, S.Si Ahmad Fahrudin, SAN Dian Wahono, S. Hum

Kepala Balai Riset Pemulihan
 Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran II

Nomor : B.25/BRPSDI/KP.440/I/2026

Tanggal : 9 Januari 2026

URAIAN TUGAS
SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN TAHUN 2026

1. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2026 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2026
 - b. Ketua
Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) Tahun 2026 sesuai dengan arahan dan kebijakan penanggung jawab Tim Penyusunan laporan kinerja (LKj)
 - c. Anggota
 - 1) Menyiapkan bahan dan informasi serta bukti capaian kinerja serta menyusun laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2026
 - 2) Melakukan pemutakhiran data dan informasi serta rekonsiliasi pada system aplikasi pengelolaan kinerja
 - d. Kontributor
Membantu pengumpulan bahan, menyiapkan dan menyampaikan data informasi serta bukti capaian kinerja dalam penyusunan laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2026
2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2026 mengikuti jadwal dan arahan dari Sekretariat BPPSDM KP sebagai Intansi Pembina dalam penyusunan Laporan Kinerja

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran II. Dokumen PK BRPSDI Tahun 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Iswari Ratna Astuti**

Jabatan : Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI	86
	2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	92,1
	3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,75
	5. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5
	6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	77
	7. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPSDI (Nilai)	71
	8. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100
	9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1
	10. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90
	11. Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	9.680.000

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.023.508.000
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2026		5.023.508.000

Jakarta, Juni 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran III. Dokumen capaian realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)

1

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOTA DINAS
NOMOR 2801/BPPSDM.1/HP.510/VII/2026**

Yth. : 1. Kepala Pusat Pendidikan KP
2. Kepala Pusat Pelatihan KP
3. Kepala Pusat Penyuluhan KP
4. Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM KP
5. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP;
6. Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP.
Dari : Sekretaris BPPSDM
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP"
Tanggal : 14 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Maret 2026 (Triwulan IV Tahun 2025 s.d Triwulan I Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni Tahun 2026 (Triwulan II Tahun 2026);
2. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan II Tahun 2026 lingkup BPPSDM KP sebesar 100,00% (tuntas 64 dari 64 rekomendasi);
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan ltjen terlampir;
4. UPT yang tidak terdapat pada lampiran, merupakan UPT yang tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas sebelum pengukuran triwulan II, sehingga capaian IKU-nya 100%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat menyampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Satker Saudara atas capaian terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Tembusan :
1. Kepala BPPSDM
2. Inspektur Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2

Lampiran

Nomor : B.2801/BPPSDM.1/HP.510/VII/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDMKP
Triwulan II Tahun 2026

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BRSDM	7	7	100,00
2	Pusat Pendidikan KP	1	1	100,00
3	Pusat Pelatihan KP	0	0	0,00
4	Pusat Penyuluhan KP (Eks Pusriskel)	15	15	100,00
5	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM KP	0	0	0
6	BBRP2BKP	0	0	0
7	BBRSEKP	0	0	0

No	Satker	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	BRPI Sukamandi	8	8	100,00
2	BPPP Tegal	4	4	100,00
3	BPPP Ambon	5	5	100,00
4	BPPP Bitung	1	1	100,00
5	SUPM Tegal	4	4	100,00
6	POLTEK KP Karawang	13	13	100,00
7	POLTEK KP Dumai	6	6	100,00

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 955/ITJ.0/TU.140/VI/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
3. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
4. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 10 Juli 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Maret 2026 (Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan I Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni Tahun 2026 (Triwulan II Tahun 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan II Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 95,39% (tuntas 641 dari 672 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Febry Budianto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP
5. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2

Lampiran
 Nomor : 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026
 Tanggal : 10 Juli 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP" Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Jenderal	43	43	100,00	0	0,00
2	Ditjen PK	115	105	91,30	10	8,70
3	Ditjen PRL	13	13	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	115	99	86,09	16	13,91
5	Ditjen PSDKP	89	89	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	170	165	97,06	5	2,94
7	BPPSDMKP	64	64	100,00	0	0,00
8	Ditjen PDSPKP	29	29	100,00	0	0,00
9	BPPMHKP	27	27	100,00	0	0,00
10	Inspektorat Jenderal	7	7	100,00	0	0,00
TOTAL		672	641	95,39	31	4,61



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Febry Budianto

Lampiran VIII. Dokumen capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 2798/BPPSDM.1/PL.410/VII/2026

Yth. : 1. Para Kepala Pusat Lingkup BPPSDM
2. Para Kepala UPT Lingkup BPPSDM
Dari : Sekretaris BPPSDM
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Triwulan II Tahun Anggaran 2026
Tanggal : 13 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SiRUP Triwulan II Tahun Anggaran 2026, berdasarkan hasil rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Terumumkan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, capaian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebesar **99,97%**. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh Kepala UPT di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan untuk:

1. Mencermati hasil capaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) masing-masing satuan kerja sebagaimana tercantum pada lampiran Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dimaksud.
2. Melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian data RUP pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu anggaran dan kondisi pelaksanaan pengadaan yang berlaku, khususnya bagi satuan kerja yang masih memiliki selisih atau berstatus **kurang terumumkan** maupun **lebih terumumkan**.
3. Memastikan seluruh paket pengadaan telah diumumkan secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan pagu pengadaan sehingga tidak memengaruhi capaian Indikator Kinerja Persentase RUP Terumumkan pada periode berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Kepala BPPSDM



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 9 Juli 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 2 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 9 Juli 2026 pukul 12:00 WIB sebesar **99,94%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

(12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – 42 Satker

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL				
	12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	352995	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	791,179,000		791,179,000	791,179,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	6,529,483,000		6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRP2BKP	3,136,163,000		3,136,163,000	3,136,163,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	1,109,213,000		1,109,213,000	1,109,213,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	13,754,039,000		13,754,039,000	13,754,039,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,541,150,000		3,541,150,000	3,541,150,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	12,257,656,000		12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	4,417,477,000		4,417,477,000	4,417,477,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	34,574,253,000		34,574,253,000	34,574,253,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	3,109,166,000		3,109,166,000	3,109,166,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HAS BRBH	2,603,171,000		2,603,171,000	2,603,171,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	403832	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN BRPI	2,868,683,000		2,868,683,000	2,868,683,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,736,888,000		1,736,888,000	1,736,888,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBAP3	4,919,286,000		4,919,286,000	4,919,286,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBATPP	5,139,080,000		5,139,080,000	6,146,393,000	(1,007,313,000)	83.61%	KURANG TERUMUMKAN
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,237,000		904,237,000	904,237,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UJUNG DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPPUPP	6,112,923,000		6,112,923,000	6,112,923,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

Lampiran X. Dokumen capaian Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 2521/BPPSDM.1/KU.340/VI/2026

Yth. : 1. Para Kepala Pusat Lingkup BPPSDM KP
2. Para Kepala UPT Lingkup BPPSDM KP
Dari : Sekretaris BPPSDM
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Proyeksi Penerimaan PNPB Tahun 2026
Tanggal : 25 Juni 2026

Dalam rangka penyusunan proyeksi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Tahun 2026, serta sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian Saldo Maksimum Pencairan (MP) Tahap II Tahun 2026 kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDM KP, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi capaian PNPB dan saldo MP Tahap I Tahun 2026 sebagai bahan informasi (terlampir), serta mohon kepada Saudara agar menyampaikan data proyeksi penerimaan PNPB Tahun 2026 melalui tautan [ProyeksiPenerimaanPNBP BPPSDMKP 2026](#).

Dalam pengisian data tersebut agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data yang disampaikan merupakan proyeksi penerimaan PNPB Tahun 2026 yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengisian dilakukan secara lengkap sesuai format yang telah disediakan pada tautan dimaksud.
3. Data yang disampaikan akan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian PNPB serta menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian Saldo Maksimum Pencairan (MP) Tahap II Tahun 2026.
4. Pengisian data paling lambat **hari Selasa, 30 Juni 2026**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian dan kerja sama Saudara agar penyampaian data dapat dilakukan tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Tembusan:
Kepala BPPSDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2

Lampiran
Nomor : B.2521/BPPSDM.1/KU.340/VI/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

REALISASI PENDAPATAN PER SATKER & MONITORING MAKSIMUM PENCAIRAN (MP) TAHAP I LINGKUP BPPSDMKP T.A.2026
(Data MyIntress per tanggal 25 Juni 2026)

SATKER	TARGET DIPA (Rp)	REALISASI CAPAIAN (Rp)	% CAPAIAN PNPB	MP I PNPB (Rp)	REALISASI SALDO MP I (Rp)	REALISASI SALDO II (Rp)	USA SALDO MP I (Rp)
1. 0204021 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN	0	5.176.621.331	-	-	-	-	-
2. 0916291 PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERI	0	46	-	-	-	-	-
3. 4275821 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	0	72.887.205	-	-	-	-	-
4. 4275801 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	0	87.886.384	-	-	-	-	-
5. 4038211 PUSAT PENELITIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	12.400.900	-	-	-	-	-
6. 4038205 LOKA RISET PERIKANAN TUNA	0	19.660.000	-	-	-	-	-
7. 403834 LOKA RISET MENENGAH PENELITIAN SUMBER PERIKANAN	0	73.354	-	-	-	-	-
8. 403830 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKOSISTEM KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	7.383.258	-	-	-	-	-
9. 403822 BALAI RISET PERIKANAN LAUT	0	2.350.000	-	-	-	-	-
10. 403821 BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN Bioteknologi KELAUTAN DAN PERI	0	8.760.000	-	-	-	-	-
11. 403820 LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	2.844.000	8.329.837	293,90%	-	-	-	-
12. 128260 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	201.600.000	192.131.423	94,82%	84.512.000	84.508.970	99,99%	3.870
13. 403821 BALAI RISET PERIKANAN PERIKANAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	40.000.000	51.385.388	128,46%	24.399.600	24.329.000	99,69%	80.600
14. 403822 BALAI RISET PEMULIHAN IKAN	474.500.000	538.134.268	113,43%	-	-	-	-
15. 403824 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	9.680.000	7.128.544	73,64%	-	-	-	-
16. 403829 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	93.500.000	69.162.635	74,07%	29.020.000	29.020.000	100,00%	-
17. 403875 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	109.320.000	79.901.617	72,99%	84.940.000	84.890.761	99,95%	49.237
18. 403827 BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	579.630.000	763.275.946	131,86%	333.481.000	333.481.000	100,00%	0
19. 127775 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	298.455.000	339.512.000	113,77%	95.505.200	94.014.277	98,44%	1.470.923
20. 128741 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	520.000.000	119.979.500	23,07%	166.199.000	89.999.900	54,20%	86.199.100
21. 403838 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	218.609.000	113.573.235	51,95%	70.900.200	70.900.200	100,00%	-
22. 128188 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	22.528.904.000	11.495.937.857	50,99%	-	-	-	-
23. 427618 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WACHIDI	488.750.000	270.388.240	55,34%	100.000.200	100.384.000	100,37%	214.200
24. 128752 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANG	822.250.000	452.746.703	55,06%	293.024.000	297.258.000	101,79%	5.890.000
25. 404031 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBER (POLTEK KP JEMBER)	610.210.000	279.586.291	45,82%	195.280.000	195.280.000	100,00%	-
26. 128020 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	471.055.000	194.576.084	41,33%	150.737.200	150.737.200	100,00%	-
27. 425295 BALAI PENGOLAHAN DAN PELATIHAN KREATIF SUKAWANDI	1.027.840.000	580.473.107	56,48%	128.000.000	128.040.000	100,02%	268.800
28. 427551 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	327.220.000	30.462.620	9,31%	40.710.400	40.600.000	99,72%	110.400
29. 427575 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARANGAN	1.378.894.000	466.269.390	33,82%	441.264.800	396.081.000	89,75%	44.563.800
30. 403897 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARANG	15.517.500.000	8.377.554.321	54,00%	-	-	-	-
31. 427511 POLITEKNIK KAU USAHA PERIKANAN (POLTEK KAU JAKARTA)	2.884.514.000	841.059.120	29,16%	921.056.800	821.964.248	89,24%	201.062.552
32. 403827 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARANG	280.040.000	74.327.388	26,54%	84.815.000	84.815.000	100,00%	-
33. 403828 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	404.220.000	111.423.787	27,56%	128.860.000	127.006.400	98,56%	62.814.500
34. 403828 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	1.000.017.000	438.177.177	43,78%	521.787.000	520.888.400	99,83%	878.200
35. 128755 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	951.783.000	328.187.782	34,48%	304.570.400	261.812.018	85,99%	42.958.382
36. 124146 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	122.010.000	67.283.786	55,15%	101.043.200	-	-	-
37. 403823 LOKA RISET BUDIDAYA IKAN LAUT	90.000.000	1.708.187	1,90%	-	-	-	-
38. 403830 BALAI RISET BUDIDAYA IKAN LAUT	220.500.000	37.558.480	17,03%	-	-	-	-
39. 252505 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATONI (AK KP WAKATONI)	18.374.000	1.200.000	6,53%	5.870.000	-	-	-
40. 403827 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	498.480.000	16.098.800	3,23%	230.073.600	194.061.000	84,34%	10.072.600
41. 403827 BALAI RISET SUMBER DAYA DAN KEKENTHANAN PESU	92.700.000	2.187.556	2,36%	-	-	-	-
42. 403879 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	884.327.000	5.929.960	0,67%	122.977.600	48.897.500	40,53%	73.080.100
GRAND TOTAL	51.462.780.000	26.143.838.864	50,80%	4.946.899.200	3.882.221.775	84,52%	734.427.424

Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3

Lampiran
Nomor : B.2521/BPPSDM.1/KU.340/VI/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

STATUS MONITORING MP DAN REALISASI CAPAIAN PNPB PADA APLIKASI MY INTRESS
(per tanggal 25 Juni 2026)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

MONITORING MP PNPB

NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	MP PNPB	Pengeluaran	Pengembalian	Total	Saldo MP
1	001 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	80.710.400	40.600.000	0	80.600.000	110.400
2	010 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	403827	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KEKENTHANAN PESU	0	0	0	0	0
3	010 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	427575	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARANGAN	611.264.800	396.081.000	0	396.081.000	4.183.800
4	014 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	403821	BALAI RISET PERIKANAN PERIKANAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	14.399.600	14.319.000	0	14.319.000	80.600
5	017 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	210.073.000	104.000.000	0	104.000.000	16.072.000
6	021 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKART	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	0	0	0	0	0
7	021 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKART	403822	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN	0	0	0	0	0
8	021 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKART	653226	BALAI PENGOLAHAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAWANDI	328.000.000	328.040.000	0	328.040.000	268.800
9	023 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ROGOR	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	26.930.000	26.930.000	0	26.930.000	0
10	023 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ROGOR	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HAS	0	0	0	0	0
11	025 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	122.977.600	48.897.500	0	48.897.500	73.080.100
12	037 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	0	0	0	0	0
13	039 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	403828	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	70.303.200	70.303.200	0	70.303.200	0
14	042 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	0	0	0	0	0
15	066 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	126.960.000	67.006.500	0	67.006.500	62.353.500
16	081 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	238751	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	304.570.400	261.812.018	0	261.812.018	42.958.382
17	091 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WACHIDI	108.999.200	108.384.000	0	108.384.000	214.200
18	095 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	427820	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	0	0	0	0	0
19	095 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	101.043.200	0	0	0	103.043.200
20	098 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARANGWANG	403827	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARANGWANG	84.815.000	84.815.000	0	84.815.000	0
21	100 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANG	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANG	261.513.000	261.386.000	4.140.000	257.258.000	5.890.000
22	103 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAWU	352585	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATONI (AK KP WAKATONI)	5.870.000	0	0	0	5.870.000
23	103 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAWU	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	0	0	0	0	0
24	118 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	237371	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	95.505.200	94.014.277	0	94.014.277	1.470.923

hal : 1 dari 2 halaman

tanggal cetak : 25-06-26 10:40:38

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 DJPB

REALISASI PENDAPATAN PER SATKER

NO	Uraian			pendapatan					detail
	BA	BAES1	SATKER	ESTIMASI	REALISASI	PENGEMBIALIAN	NETTO	PERSENTASE	
1	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	237373 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	296.455.000,00	199.012.000,00	0,00	199.012.000,00	66,98%	akun
2	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	238010 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	471.055.000,00	194.578.084,00	0,00	194.578.084,00	41,31%	akun
3	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	238741 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	520.003.000,00	319.879.550,00	0,00	319.879.550,00	61,51%	akun
4	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	238755 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	951.783.000,00	228.187.782,00	0,00	228.187.782,00	23,97%	akun
5	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	822.355.000,00	421.746.701,00	0,00	421.746.701,00	51,29%	akun
6	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	239188 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	22.528.904.000,00	14.147.597.857,00	652.240.000,00	13.495.357.857,00	59,90%	akun
7	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	239260 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	201.800.000,00	292.131.423,00	0,00	292.131.423,00	144,91%	akun
8	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	352995 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOB (AK KP WAKATOB)	18.374.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	6,53%	akun
9	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	403817 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	92.700.000,00	2.167.596,00	0,00	2.167.596,00	2,34%	akun
10	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	403820 LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	3.344.000,00	8.329.837,00	0,00	8.329.837,00	249,10%	akun
11	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	403821 PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	12.400.900,00	0,00	12.400.900,00	0,00%	akun
12	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	403822 BALAI RISET PERIKANAN LAUT	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00%	akun
13	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	403823 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN LUAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	45.000.000,00	51.283.589,00	0,00	51.283.589,00	113,96%	akun
14	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	403824 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	9.680.000,00	7.128.544,00	0,00	7.128.544,00	73,64%	akun
15	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	403826 LOKA RISET PERIKANAN TUNA	0,00	19.860.000,00	0,00	19.860.000,00	0,00%	akun

hal : 1 dari 3 halaman

tanggal cetak : 25-08-2012 12:48:14

Lampiran XII. Dokumen capaian Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)

TABEL PERHITUNGAN PEMENUHAN DOKUMEN IKSK.01.08 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI Triwulan II Tahun 2026											
No	Jenis Laporan	B01		B02		B03		S.D. Triwulan II		Persentase (%)	Bukti Dukung
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
1	Laporan Mingguan	4	4	4	4	4	4	24	24	100	https://drive.google.com/drive/folders/1kupeR2d1OoLaF3-M58Sma4cMlyk47Z97usp=drive_link
2	Laporan Bulanan										
	a. Laporan Manajerial	1	1	1	1	1	1	6	6	100	https://drive.google.com/drive/folders/1YPOEbAvvNsbPn2F0OsFhfU19TS3R7pNm?usp=drive_link
	b. Laporan Realisasi Keuangan	1	1	1	1	1	1	6	6	100	https://drive.google.com/drive/folders/1C2i45GDZ3DaSGOk07n1J1J81TTC7iSwS?usp=drive_link
	c. Laporan Penanganan pengaduan lingkup BRPSDI	1	1	1	1	1	1	6	6	100	https://drive.google.com/drive/folders/1P7ohlrXBjEdqm7YXlO9itFigr3k5lkd3?usp=drive_link
3	Laporan Triwulanan										
	a. Laporan Kinerja (LKj)	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1mLiQYRmjO8ilH-VQ22ubcLnGYifn7633?usp=drive_link
	b. Laporan SPIP	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1RxmSet7zFg5EtKg9p-TsA-

No	Jenis Laporan	B01		B02		B03		S.D. Triwulan II		Persentase (%)	Bukti Dukung
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
											ev05AIM_sS?usp=drive_l ink
	c. Laporan Kegiatan Jabatan Fungsional	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1mLiQYRmjO8iIH-VQ22ubcLnGYifn7633?usp=drive_link
	d. Laporan PPID	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1shnnCWbQn0EDgmrK3aJREi76ZLcltWjO?usp=drive_link
	e. Laporan Pelayanan Publik	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1K24wNU NZ5LNvUFlulzEOGfouu5EE0jr1?usp=drive_link
	f. Laporan Humas dan Data	-	-	-	-	1	1	2	2	100	https://drive.google.com/drive/folders/1UXYI43RjI48o_dEQJbV7DYWS5k5NycrU?usp=drive_link
TOTAL JUMLAH								54	54	100	

Jatiluhur, 13 Juli 2026

Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan



Ir. Iswari Ratna Astuti

NIP. 19691124 199503 2 001